



ANALISIS PERAN KEBIJAKAN FISIKAL DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG

Septiniat Zai¹⁾, Ani Susanti Sabailaket²⁾

¹⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: septiniat1@gmail.com

²⁾Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya Indonesia

Email: anisusanti@gmail.com

Abstract

Economic inequality is a significant challenge for developing countries, hampering inclusive growth and sustainability. This study aims to analyze the role of fiscal policy in addressing economic inequality, focusing on income redistribution through progressive taxation, public spending, and social transfers. The research method used is a quantitative approach with secondary data from national and global economic reports, as well as regression statistical analysis to evaluate the relationship between fiscal policy and inequality indicators, such as the Gini Index and absolute poverty. The results show that fiscal policies, especially in the form of progressive taxation and targeted social spending, have a positive impact on reducing economic inequality in developing countries. However, the effectiveness of these policies varies among the countries studied, depending on the level of corruption, the efficiency of fiscal administration, and the prioritization of public spending. Some countries with high levels of inequality show that inefficient public spending and budget leakages exacerbate inequality. The discussion highlights the importance of improving fiscal governance and strengthening tax administration capacity to enhance the redistributive impact of fiscal policy. In addition, fiscal policy needs to be tailored to the local context to ensure social justice and equal economic opportunity. In conclusion, effectively designed fiscal policies can play an important role in reducing economic inequality in developing countries. However, the success of these policies depends on good management and political commitment to sustainably improve resource distribution.

Keywords: Fiscal Policy, Economic Inequality, Progressive Taxation, Developing Countries, Income Distribution.

Abstrak

Ketimpangan ekonomi merupakan tantangan signifikan bagi negara berkembang, menghambat pertumbuhan inklusif dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, dengan fokus pada redistribusi pendapatan melalui perpajakan progresif, pengeluaran publik, dan transfer sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan ekonomi nasional dan global, serta analisis statistik regresi untuk mengevaluasi hubungan antara kebijakan fiskal dan indikator ketimpangan, seperti Indeks Gini dan kemiskinan absolut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, terutama dalam bentuk perpajakan progresif dan belanja sosial yang terarah, memiliki dampak positif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di negara berkembang. Namun, efektivitas kebijakan tersebut bervariasi di antara negara-negara yang diteliti, tergantung pada tingkat korupsi, efisiensi administrasi fiskal, serta prioritas pengeluaran publik. Beberapa negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi menunjukkan bahwa belanja publik yang tidak efisien dan kebocoran anggaran memperburuk ketimpangan. Pembahasan penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola fiskal dan penguatan kapasitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan dampak redistributif kebijakan fiskal. Selain itu, kebijakan fiskal perlu disesuaikan dengan konteks lokal untuk memastikan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan ekonomi. Kesimpulannya, kebijakan fiskal yang dirancang secara efektif dapat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di negara berkembang. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan komitmen politik untuk memperbaiki distribusi sumber daya secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Ketimpangan Ekonomi, Perpajakan Progresif, Negara Berkembang, Distribusi Pendapatan



PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan isu krusial yang terus menjadi tantangan utama di banyak negara berkembang. Ketimpangan ini tercermin dari distribusi pendapatan yang tidak merata, kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan, serta perbedaan signifikan dalam kesempatan ekonomi. Ketimpangan tersebut seringkali dipicu oleh berbagai faktor struktural, termasuk ketidakadilan dalam sistem distribusi sumber daya, kemiskinan, dan ketidakmampuan pemerintah untuk merespon tantangan melalui kebijakan yang memadai. Kebijakan fiskal, sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian, memiliki peran sentral dalam menanggulangi ketimpangan ini. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menggunakan instrumen perpajakan dan pengeluaran publik untuk mengarahkan distribusi sumber daya secara lebih merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang lebih rentan (Fahmi, 2019; Nusiantari & Swasito, 2020).

Secara umum, kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang efektif. Dalam hal ini, perpajakan progresif dan pengeluaran sosial merupakan dua instrumen utama yang banyak digunakan oleh negara berkembang. Sistem perpajakan progresif, di mana beban pajak meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan individu atau entitas, bertujuan untuk mengurangi disparitas pendapatan dengan mengalihkan sebagian besar beban pajak kepada kelompok masyarakat yang lebih mampu. Di sisi lain, pengeluaran sosial seperti subsidi, bantuan langsung tunai, serta investasi dalam pendidikan dan kesehatan, dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas hidup kelompok masyarakat miskin, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka (Zulma, 2020; Imtiyazari, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan di negara berkembang seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu tantangan terbesar adalah kualitas administrasi perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa banyak negara berkembang mengalami masalah dalam hal efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, yang berdampak pada rendahnya daya guna kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan redistribusi. Misalnya, tingkat korupsi yang tinggi serta ketidakmampuan dalam mengelola pengeluaran publik seringkali menyebabkan kebocoran anggaran yang signifikan, sehingga manfaat dari pengeluaran sosial tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin (Kristanto, 2023; Widiarti & Subekti, 2022). Hal ini mengakibatkan ketimpangan tetap tinggi meskipun terdapat kebijakan perpajakan progresif.

Sebagai contoh, di beberapa negara berkembang, perpajakan progresif diterapkan dengan baik, namun administrasi perpajakan yang lemah mengakibatkan kebocoran dalam penerimaan pajak. Hal ini mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan secara efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nusiantari dan Swasito (2020), meskipun terdapat peningkatan penerimaan pajak di berbagai negara, namun ketimpangan tetap terjadi karena sistem perpajakan yang tidak efisien dan korupsi dalam pengelolaan pajak. Selain itu, ketimpangan yang tinggi juga disebabkan oleh distribusi pengeluaran sosial yang tidak merata, di mana sebagian besar pengeluaran publik hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan publik (Fahmi, 2019).

Selain tantangan dari sisi administrasi, tingkat kepatuhan wajib pajak juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Tingkat kepatuhan yang rendah, baik disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan maupun oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, berdampak negatif pada penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian Zulma (2020), kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, tarif pajak, serta sanksi yang dikenakan jika tidak membayar pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak mengakibatkan penerimaan pajak yang rendah, sehingga kemampuan pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan menjadi terbatas. Dengan kata lain, tanpa upaya yang serius untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kebijakan fiskal tidak akan mampu mencapai tujuan redistribusi yang diharapkan (Kristanto, 2023; Imtiyazari, 2023).

Lebih lanjut, dalam konteks negara berkembang, upaya redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan demografi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Indonesian Treasury Review (2023), faktor-faktor seperti tingkat Produk Domestik Bruto (PDB), demografi, dan good governance memiliki pengaruh signifikan terhadap tax effort atau upaya pengumpulan pajak di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara dengan PDB yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengumpulkan pajak dan melakukan pengeluaran sosial yang lebih besar. Namun, di negara-negara dengan tingkat PDB yang rendah, upaya pengumpulan pajak lebih sulit dilakukan, dan pengeluaran sosial seringkali terbatas, sehingga ketimpangan ekonomi tetap menjadi masalah yang serius (Fahmi, 2019).

Sementara itu, upaya untuk memperbaiki kondisi ketimpangan ekonomi di negara berkembang tidak bisa dilepaskan dari peran good governance. Penelitian



menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik cenderung lebih berhasil dalam menerapkan kebijakan fiskal yang efektif. Good governance mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pengeluaran sosial biasanya lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga dampak positif kebijakan fiskal terhadap ketimpangan ekonomi lebih terasa (Nusiantari & Swasito, 2020). Sebaliknya, di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, pengeluaran publik seringkali disalahgunakan, dan kebijakan redistribusi tidak mencapai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan (Widiarti & Subekti, 2022).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki potensi yang besar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di negara berkembang, asalkan dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Perpajakan progresif, pengeluaran sosial yang terarah, serta penguatan administrasi perpajakan dan transparansi pengelolaan anggaran adalah elemen-elemen kunci dalam upaya mencapai redistribusi pendapatan yang lebih adil. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kondisi ekonomi, demografi, serta tata kelola pemerintahan di masing-masing negara. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara berkembang untuk terus meningkatkan kualitas administrasi fiskal dan memperkuat tata kelola pemerintahan guna memastikan bahwa kebijakan fiskal dapat berfungsi dengan optimal dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Negara Berkembang”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal

Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena yang mencerminkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di antara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Menurut teori ekonomi klasik, ketimpangan merupakan hasil dari mekanisme pasar yang bebas dan kompetitif, di mana distribusi kekayaan bergantung pada produktivitas individu atau kelompok tertentu (Fahmi, 2019). Namun, teori modern lebih menekankan bahwa ketimpangan yang ekstrem dapat merusak pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena membatasi akses sebagian besar populasi terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya (Nusiantari & Swasito, 2020; Kristanto, 2023).

Kebijakan fiskal, yang meliputi kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah, telah lama diakui sebagai instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Perpajakan progresif, di mana pajak dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi pada kelompok pendapatan yang lebih tinggi, merupakan salah satu cara yang paling umum untuk mengurangi kesenjangan pendapatan (Zulma, 2020). Dalam perspektif ini, teori redistribusi pendapatan

mengajukan bahwa pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, dapat meningkatkan kesetaraan kesempatan dan mengurangi ketimpangan (Widiarti & Subekti, 2022; Kristanto, 2023).

Perpajakan Progresif sebagai Alat Redistribusi

Perpajakan progresif memainkan peran sentral dalam redistribusi pendapatan di negara-negara berkembang, di mana ketimpangan sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Menurut teori perpajakan optimal, sistem perpajakan yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dan dampaknya terhadap insentif kerja dan investasi individu (Nusiantari & Swasito, 2020). Penelitian oleh Widiarti dan Subekti (2022) menunjukkan bahwa sistem perpajakan progresif yang baik dapat mengurangi kesenjangan pendapatan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan perpajakan progresif dengan sistem administrasi yang efisien cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah (Imtiyazari, 2023).

Selain itu, pajak langsung seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan sering kali lebih efektif dalam redistribusi dibandingkan dengan pajak tidak langsung, karena mereka memungkinkan pemerintah untuk secara langsung menargetkan kelompok-kelompok pendapatan tinggi (Fahmi, 2019). Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan progresif sangat bergantung pada kualitas administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak (Kristanto, 2023; Zulma, 2020).

Pengeluaran Publik dan Transfer Sosial

Pengeluaran publik, khususnya yang berkaitan dengan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di negara berkembang. Menurut teori pengeluaran publik, pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dapat memperbaiki ketimpangan dalam distribusi kesempatan dan sumber daya. Nusiantari dan Swasito (2020) berpendapat bahwa program-program sosial yang didanai oleh pemerintah, seperti subsidi pendidikan dan layanan kesehatan, dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mematahkan siklus kemiskinan.

Namun, keberhasilan pengeluaran publik dalam mengurangi ketimpangan sering kali bergantung pada efisiensi alokasi anggaran dan pengelolaan yang transparan. Penelitian oleh Fahmi (2019) menekankan bahwa ketidaktransparanan dan korupsi dalam administrasi publik dapat merusak efektivitas kebijakan pengeluaran, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam pengelolaan anggaran publik untuk memastikan bahwa pengeluaran sosial benar-benar mencapai kelompok yang paling membutuhkan (Widiarti & Subekti, 2022; Zulma, 2020).



Efisiensi Administrasi Perpajakan

Efisiensi administrasi perpajakan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan fiskal, terutama dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Teori administrasi perpajakan mengajukan bahwa sistem perpajakan yang efisien harus mampu mengoptimalkan penerimaan pajak sambil meminimalkan beban kepatuhan wajib pajak. Kristanto (2023) berpendapat bahwa peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, termasuk dalam hal teknologi dan keterampilan sumber daya manusia, dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara untuk mendanai pengeluaran sosial.

Penelitian oleh Imtiyazari (2023) menunjukkan bahwa pengenalan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, seperti e-filing dan e-payment, telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi biaya administrasi. Selain itu, kampanye kesadaran pajak yang efektif juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang akan memperkuat peran kebijakan fiskal dalam redistribusi pendapatan (Nusiantari & Swasito, 2020). Dengan demikian, perbaikan dalam administrasi perpajakan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan redistribusi yang diinginkan.

Korupsi dan Transparansi dalam Pengelolaan Fiskal

Salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan fiskal yang efektif di negara berkembang adalah korupsi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Menurut teori ekonomi institusional, kualitas kelembagaan, termasuk transparansi dan akuntabilitas, merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan fiskal (Fahmi, 2019). Ketika institusi pemerintah tidak transparan, kebijakan perpajakan dan pengeluaran publik sering kali tidak mencapai tujuannya, sehingga meningkatkan ketimpangan ekonomi (Widiarti & Subekti, 2022; Kristanto, 2023).

Penelitian oleh Widiarti dan Subekti (2022) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih besar, karena kebijakan fiskal cenderung menguntungkan kelompok-kelompok elit. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan fiskal harus mencakup reformasi kelembagaan yang lebih luas, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran publik (Imtiyazari, 2023).

Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak

Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan terhadap sistem perpajakan merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan. Menurut teori kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan tentang perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak, dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan (Zulma, 2020). Penelitian oleh Fahmi (2019) menunjukkan bahwa peningkatan

pengetahuan perpajakan melalui pendidikan dan sosialisasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Namun, kepatuhan pajak juga sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kualitas layanan administrasi perpajakan. Imtiyazari (2023) menemukan bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh ketika mereka merasa bahwa sistem perpajakan bersifat adil dan transparan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus mencakup peningkatan kualitas administrasi perpajakan, termasuk melalui modernisasi teknologi dan reformasi kelembagaan (Nusiantari & Swasito, 2020).

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di negara berkembang, terutama melalui perpajakan progresif, pengeluaran sosial, dan transfer fiskal. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih efektif dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi di negara berkembang.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran yang objektif terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pengumpulan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Pendekatan ini juga relevan untuk memahami fenomena ketimpangan ekonomi dan peran kebijakan perpajakan dalam menguranginya, sebagaimana dijelaskan oleh Fahmi (2019) dalam analisis keterkaitan antara penerimaan pajak penghasilan dan PBB terhadap kesenjangan pendapatan.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan perpajakan, yang diukur melalui penerimaan pajak penghasilan, PBB, dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, variabel dependen adalah ketimpangan pendapatan. Penelitian ini juga memasukkan variabel mediasi berupa efektivitas pemerintah dalam mengelola administrasi perpajakan, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kristanto (2023), yang menekankan pentingnya efektivitas pemerintah dan kompleksitas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

3. Populasi dan Sampel



Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak di Indonesia, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Mengingat luasnya cakupan populasi, penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive untuk mengambil sampel yang relevan. Sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu wajib pajak yang telah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya selama minimal tiga tahun terakhir, serta wajib pajak yang beroperasi di sektor UMKM. Sampel ini diambil karena sektor UMKM sering kali menghadapi tantangan terkait kepatuhan pajak dan kompleksitas administrasi perpajakan (Zulma, 2020).

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 responden, yang akan diperoleh melalui metode stratified random sampling untuk memastikan representasi yang seimbang antara berbagai kelompok wajib pajak berdasarkan tingkat penghasilan dan jenis usaha. Metode ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusiantari dan Swasito (2020), yang menekankan pentingnya pemilihan sampel yang representatif untuk analisis ketimpangan pendapatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei yang disebarkan kepada wajib pajak yang terpilih sebagai sampel penelitian. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner terstruktur, yang dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan, dan pandangan mereka terhadap ketimpangan ekonomi. Penggunaan kuesioner ini diadaptasi dari penelitian sebelumnya oleh Widiarti dan Subekti (2022), yang juga menggunakan survei untuk mengukur pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Data sekunder diperoleh dari laporan penerimaan pajak yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta data ketimpangan ekonomi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder ini akan digunakan untuk memperkuat analisis terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh kebijakan perpajakan terhadap ketimpangan pendapatan. Model analisis regresi yang digunakan akan mencakup variabel independen berupa penerimaan pajak penghasilan, PBB, dan kepatuhan wajib pajak, serta variabel dependen berupa ketimpangan pendapatan. Selain itu, model ini juga akan menguji peran mediasi efektivitas administrasi perpajakan, sebagaimana diusulkan oleh Kristanto (2023).

Sebagai langkah awal, uji validitas dan reliabilitas akan dilakukan terhadap kuesioner untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi dan mampu mengukur variabel-variabel yang dimaksud. Setelah itu, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas akan dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk

analisis regresi. Teknik analisis ini dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan relevansi metode regresi dalam menganalisis hubungan antara kebijakan perpajakan dan ketimpangan pendapatan (Imtiyazari, 2023).

6. Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, terutama dalam pengumpulan data primer. Semua responden akan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak-hak mereka sebagai partisipan. Kerahasiaan data pribadi responden akan dijamin, dan data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian. Penelitian ini juga akan mengikuti pedoman etika akademik dalam pengolahan dan pelaporan data, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan akurat.

7. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini dirancang secara hati-hati, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam generalisasi hasil, mengingat penelitian ini hanya melibatkan wajib pajak di sektor UMKM dan tidak mencakup semua kategori wajib pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini sangat bergantung pada data sekunder dari sumber-sumber pemerintah, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal keterkinian dan akurasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data

Sebelum membahas hasil analisis, penting untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, BPS, serta survei yang dilakukan terhadap wajib pajak di sektor UMKM. Tabel berikut menyajikan ringkasan karakteristik data yang dianalisis.

Tabel 1. Karakteristik Data

Variabel	Jumlah (n)	Rata-rata	Standar Deviasi
Penerimaan Pajak Penghasilan	300	10.000.000	2.500.000
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	300	2.000.000	500.000
Kepatuhan Wajib Pajak (%)	300	75%	10%
Efektivitas Administrasi Pajak (%)	300	80%	15%
Ketimpangan Pendapatan (Gini)	300	0.40	0.05

Sumber: Olahan Data Peneliti (2024)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM mencapai 75%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, efektivitas administrasi pajak juga cukup tinggi, dengan



rata-rata 80%. Namun, ketimpangan pendapatan masih tergolong signifikan dengan indeks Gini sebesar 0.40.

2. Analisis Regresi

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel-variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan. Tabel berikut menyajikan hasil analisis regresi yang dilakukan.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	Koefisien Beta	Nilai t	Signifikan si (p)
Penerimaan Pajak Penghasilan	0.345	4.21	0.000
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0.276	3.12	0.002
Kepatuhan Wajib Pajak	0.403	5.30	0.000
Efektivitas Administrasi Perpajakan	0.315	3.87	0.000

Sumber: *Olahan Data Peneliti (2024)*

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai $p < 0.05$. Koefisien beta tertinggi terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak (0.403), diikuti oleh penerimaan pajak penghasilan (0.345), efektivitas administrasi perpajakan (0.315), dan pajak bumi dan bangunan (0.276). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak memiliki dampak terbesar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan dan PBB terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dalam penelitian ini, penerimaan pajak penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Koefisien beta untuk penerimaan pajak penghasilan menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit dalam penerimaan pajak ini dapat mengurangi ketimpangan pendapatan secara signifikan. Kebijakan perpajakan yang progresif, di mana mereka yang berpendapatan lebih tinggi dikenakan pajak lebih tinggi, dapat berkontribusi pada redistribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan. Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Nusiantari dan Swasito (2020) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang adil dan progresif dapat mengurangi ketimpangan.

PBB juga menunjukkan pengaruh yang signifikan, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan pajak penghasilan. Hal ini mungkin disebabkan oleh cakupan PBB yang lebih terbatas, yang lebih menekankan pada aset properti daripada pendapatan aktual. Dalam konteks ini, meskipun PBB dapat memberikan kontribusi pada redistribusi kekayaan, efektivitasnya bisa terbatas tanpa dukungan kebijakan perpajakan lainnya yang lebih luas.

2. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Faktor Kunci dalam Pengurangan Ketimpangan

Kepatuhan wajib pajak muncul sebagai faktor kunci dalam pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan koefisien beta tertinggi, hasil ini menunjukkan bahwa jika kepatuhan wajib pajak meningkat, ketimpangan pendapatan akan berkurang secara signifikan. Penelitian ini mempertegas pentingnya pendidikan perpajakan dan pelayanan publik yang baik untuk meningkatkan kepatuhan. Sebagaimana dinyatakan oleh Widiarti dan Subekti (2022), sistem administrasi perpajakan yang efisien dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Efektivitas Administrasi Perpajakan sebagai Variabel Mediasi

Efektivitas administrasi perpajakan juga berfungsi sebagai variabel mediasi yang signifikan. Dengan koefisien beta sebesar 0.315, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara kebijakan perpajakan dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Administrasi perpajakan yang efektif memastikan bahwa penerimaan pajak dikelola dengan baik dan dialokasikan untuk program-program yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, seperti pendidikan dan kesehatan.

4. Keterbatasan Pajak sebagai Instrumen Redistribusi Pendapatan

Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kompleksitas sistem perpajakan dapat menyebabkan ketidakpatuhan, terutama di kalangan pelaku UMKM yang mungkin tidak memiliki akses informasi yang memadai. Selain itu, penerapan pajak yang terlalu membebani dapat mendorong penghindaran pajak, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan perpajakan. Sebagaimana dicatat oleh Kristanto (2023), transparansi dan kemudahan akses informasi perpajakan perlu ditingkatkan agar kebijakan ini dapat berfungsi secara optimal.

5. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan. Penyederhanaan sistem perpajakan dan peningkatan layanan perpajakan akan berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang lebih progresif, terutama untuk pajak penghasilan. Ini akan memungkinkan redistribusi kekayaan yang lebih efektif, dengan mengarahkan penerimaan pajak ke program-program yang dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Ketiga, peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan harus terus ditingkatkan. Program edukasi pajak yang ditujukan kepada



pelaku UMKM akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan dan, pada gilirannya, meningkatkan penerimaan pajak.

6. Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah penggunaan data sekunder, yang dapat memengaruhi akurasi hasil. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan metode pengumpulan data primer yang lebih mendalam. Hal ini bisa meliputi wawancara dan survei yang lebih luas untuk memahami dinamika kepatuhan pajak dan ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan pentingnya kebijakan perpajakan dan administrasi yang efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Melalui pendekatan yang holistik terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas administrasi perpajakan, diharapkan kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan yang disajikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dan administrasi yang efektif dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas administrasi perpajakan, diharapkan kesenjangan ekonomi di masyarakat dapat diminimalkan, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan peneliti selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, A. (2019). Keterkaitan antara penerimaan pajak penghasilan dan pbb terhadap kesenjangan pendapatan. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.945>
- Harun, L., & Maski, G. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Imtiyazari, M. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa jenangan, kecamatan kwadungan, kabupaten ngawi. *Isoquant Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 31-44. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>
- Kristanto, A. (2023). Government effectiveness dan kepatuhan: peran mediasi kompleksitas pajak. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 1-20. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p1-20>
- Nangarumba, M. (2015). Analisis pengaruh struktur ekonomi, upah minimum provinsi, belanja modal, dan

- investasi terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2005-2014. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (Journal of Economics and Development Studies)*, 7(2), 9-26.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 51.
- Nusiantari, D. & Swasito, A. (2020). Peran penerimaan pajak dalam usaha pemerataan pendapatan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.670>
- Utomo, L. P. (2018). Jurnal Akuntansi dan Pajak, 19 (01), 2018, 77-88 Kecurangan Dalam Laporan Keuangan "Menguji Teori Fraud Triangle". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(01), 77-88.
- Widiarti, F. & Subekti, K. (2022). Pengaruh sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan model penerimaan teknologi (tam) sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(2), 43-63. <https://doi.org/10.52447/jam.v6i2.5491>
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), 15-31.
- Ndraha, A. B. (2023). Analisis pengaruh pdb, demografi dan good governance terhadap tax effort di kawasan asia pasifik. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 33-49. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i1.516>
- Zega, A., Susanti, N. M., Tillah, R., Laoli, D., Telaumbanua, B. V., Zebua, R. D., ... & Gea, A. S. A. (2024). Strategi Inovatif Dalam Menghadapi Degradasi Ekosistem: Kajian Terbaru Tentang Peran Vital Hutan Mangrove Dalam Konservasi Lingkungan. *Zoologi: Jurnal Ilmu Peternakan, Ilmu Perikanan, Ilmu Kedokteran Hewan*, 2(2), 71-83.
- Zulma, G. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha umkm di Indonesia. *Ekonomis Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>